

MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2023-2024

Rabiatul Adawiyah¹, Victoria Kusumaningtyas Priyambodo^{2*}, Wulandari
Agustiningsih³

¹Universitas Mataram, Indonesia, rabiatuladawyh2@gmail.com

²Universitas Mataram, Indonesia, priyambodo.victoria@unram.ac.id

³Universitas Mataram, Indonesia, wulandari.agustiningsih@staff.unram.ac.id

(*Corresponding Author)

DOI: xxxxxxxx

PENGUTIPAN:

Priyambodo, V. K., Adawiyah, R., & Agustiningsih, W. (2026). Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023-2024. *Zentrum Economic, Business, Management, Accounting Research*, 4(2), 63-73.

Abstrak: Pengelolaan keuangan dalam ranah otonomi menuntut akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun anggaran 2023-2024. Menggunakan desain deskriptif kuantitatif, analisis kinerja dalam penelitian ini mengadopsi kerangka kondisi keuangan yang mencakup dimensi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, kemandirian finansial, dan solvabilitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya tren penurunan likuiditas dan fleksibilitas fiskal yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Solvabilitas jangka pendek melemah drastis akibat penurunan kas dan piutang, sementara solvabilitas anggaran menunjukkan total belanja daerah telah melampaui pendapatan pada tahun 2024. Di sisi lain, struktur permodalan jangka panjang dinilai sangat aman karena nihilnya kewajiban jangka panjang. Namun, tingkat kemandirian finansial daerah tergolong masih sangat rendah dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah 5%, mengonfirmasi tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan efisiensi belanja operasional serta optimalisasi penggalan potensi PAD agar kapasitas fiskal daerah dapat tumbuh berkelanjutan.

Kata kunci: Bolaang Mongondow Utara, Kemandirian Fiskal, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Solvabilitas

Abstract: Local financial management within the framework of regional autonomy demands accountability and comprehensive performance measurement. This study aims to assess and analyze the financial performance of the Local Government of Bolaang Mongondow Utara Regency for the 2023–2024 fiscal years. Utilizing a descriptive quantitative research design, the performance evaluation adopts the financial condition framework developed by Ritonga (2014), which encompasses short-term solvency, budgetary solvency, long-term solvency, financial flexibility, financial independence, and service solvency. The results reveal a significant downward trend in liquidity and fiscal flexibility from 2023 to 2024. Short-term solvency weakened drastically due to a sharp decline in cash and receivables, while budgetary solvency indicated that total regional expenditure exceeded total revenue in 2024. Conversely, the long-term financial position remains highly secure as there are no long-term liabilities. However, the level of financial independence is

remarkably low, with Regional Original Revenue (PAD) contributing less than 5%, confirming a severe reliance on central government transfer funds. The implications of this research emphasise the urgent need for operational expenditure efficiency and the optimisation of local revenue sources to foster sustainable fiscal capacity.

Keywords: North Bolaang Mongondow, Fiscal Independence, Financial Performance, Financial Ratios, Solvability

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah menuntut pengelolaan keuangan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu mencerminkan kinerja pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab (Darmi, 2018; Dona et al., 2022). Keuangan daerah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena melalui pengelolaan anggaran daerah pemerintah dapat menjalankan program pembangunan serta menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat (Lathifah et al., 2024). Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah (Syam & Zulfikar, 2022).

Dalam praktiknya, penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sering kali disederhanakan menjadi aspek realisasi anggaran atau besarnya pendapatan daerah (Disastra et al., 2025). Pendekatan semacam ini cenderung kurang memadai karena tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan daerah secara menyeluruh. Kinerja keuangan daerah sesungguhnya merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti struktur pendapatan, pola belanja, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara berkelanjutan (Mulia & Widiatmoko, 2025). Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan analitis yang lebih komprehensif untuk memahami kinerja keuangan pemerintah daerah secara proporsional dan kontekstual.

Sejumlah penelitian terdahulu telah melakukan studi kinerja keuangan di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian Santoso et al. (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2019 memiliki pertumbuhan PAD yang positif dengan tingkat efektivitas yang tinggi, serta rasio kemandirian yang terus meningkat pada kategori sedang. Namun, tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat masih tergolong sangat tinggi, dan alokasi dana terpantau masih lebih banyak didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal. Studi oleh Aithan et al. (2025) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2024 dinilai cukup baik, tercermin dari evaluasi rasio kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, dan efisiensi belanja daerah. Penelitian Nadofah et al. (2025) menunjukkan adanya ketimpangan fiskal yang signifikan antar provinsi di Indonesia pada tahun 2024, yang mana wilayah Pulau Jawa dan Sumatra memiliki tingkat kemandirian fiskal serta desentralisasi yang baik, sedangkan wilayah Maluku, Papua dan sebagian besar Indonesia Timur masih sangat bergantung pada dana pusat.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakteristik wilayah dan struktur ekonomi yang khas. Perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam memberikan kontribusi penting bagi kehidupan masyarakat, namun sekaligus membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini menyebabkan peran dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi komponen utama dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tantangan struktural yang melekat pada karakteristik daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi salah satu instrumen penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Sinaga et al., 2026). LKPD tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, tetapi juga menyediakan informasi yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui analisis terhadap laporan keuangan, khususnya dengan menggunakan rasio keuangan, dapat diperoleh gambaran mengenai kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan, tingkat kemandirian fiskal, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Pemilihan periode tahun anggaran 2023-2024 dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan relevansi dan aktualitas data. Analisis terhadap dua tahun anggaran berturut-turut memungkinkan dilakukan perbandingan kinerja keuangan secara lebih objektif, sehingga dapat terlihat pola pengelolaan keuangan daerah serta konsistensi kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keuangan daerah pada periode terkini.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan laporan keuangan daerah menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini dimaksudkan untuk memahami kondisi keuangan daerah secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan struktural yang melingkupinya. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator krusial dalam menilai kapasitas, kemandirian dan akuntabilitas daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut Halim & Kusufi (2017), pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, serta mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan dan membelanjakan anggaran daerah. Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa evaluasi kinerja keuangan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki alokasi sumber daya publik, melainkan juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Dalam perkembangannya, analisis kinerja secara praktis dievaluasi menggunakan serangkaian rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi, untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan PAD guna mengurangi ketergantungan pada transfer dana pusat (Mahmudi, 2019).

Analisis rasio keuangan merupakan alat penting untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah secara lebih objektif dan terukur. Berbeda dengan analisis nominal yang hanya menunjukkan besar-kecilnya angka keuangan, analisis rasio memberikan gambaran mengenai kemampuan, keterbatasan, serta risiko keuangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, analisis rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengacu pada kerangka pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) yang mencakup enam dimensi utama.

Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun anggaran dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini berkaitan erat dengan likuiditas daerah dan kelancaran pelaksanaan aktivitas pemerintahan sehari-hari. Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam 30 sampai 60 hari. Namun, penelitian ini menggunakan periode 12 bulan, bukan 30-60 hari, karena pengungkapan dalam neraca berkaitan dengan kewajiban lancar yang jatuh tempo dalam 12 bulan.

Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya dengan pendapatan yang tersedia dalam satu periode anggaran. Rasio ini menjadi indikator penting untuk menilai keberlanjutan pengelolaan anggaran serta tingkat kehati-hatian pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan APBD. Oleh karena itu, indikator dalam dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan operasional (sebagai pembilang) dan belanja operasional (sebagai penyebut) selama periode anggaran.

Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan mempertimbangkan total aset yang dimiliki. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kesehatan keuangan daerah dalam perspektif jangka panjang serta risiko fiskal yang mungkin dihadapi di masa depan. Untuk mencerminkan solvabilitas jangka panjang, rasio yang tepat adalah dengan menempatkan kewajiban jangka panjang sebagai penyebut dan total aset atau ekuitas investasi sebagai pembilang. Nilai rasio yang lebih besar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Sebaliknya, nilai rasio yang lebih rendah menunjukkan kemampuan yang lebih rendah.

Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan keuangannya terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas keuangan adalah kondisi di mana pemerintah daerah mampu meningkatkan sumber daya keuangannya untuk merespons peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang (CICA, 1997). Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut, indikator dalam dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang selama periode keuangan.

Kemandirian Finansial

Kemandirian keuangan adalah kondisi di mana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan yang berada di luar kendali atau pengaruhnya, baik yang berasal dari sumber nasional maupun internasional (CICA, 1997). Untuk memenuhi definisi tersebut, pembilang dalam rasio harus berupa pendapatan asli pemerintah daerah, sedangkan penyebutnya adalah total pendapatan atau total belanja. Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan semakin besar. Dengan demikian, semakin tinggi hasil kedua rasio tersebut, semakin baik tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Solvabilitas Layanan

Solvabilitas tingkat layanan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas layanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Wang et al., 2007). Untuk memenuhi definisi tersebut, penyebut pada dimensi ini harus berupa jumlah penduduk yang dilayani oleh pemerintah daerah.

METODE

Studi ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini dipilih untuk menunjukkan kinerja keuangan secara mendalam di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersedia di portal resmi. Teknis analisis yaitu menggunakan rasio keuangan yang diadopsi dari penelitian Ritonga (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Rasio untuk mengukur solvabilitas jangka pendek:

$$Rasio A = \frac{(\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$Rasio B = \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$Rasio C = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2. Rasio untuk mengukur solvabilitas anggaran:

$$Rasio A = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal}}$$

$$Rasio B = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{\text{Belanja Operasional}}$$

$$Rasio C = \frac{(\text{Pendapatan Dana Alokasi})}{\text{Belanja Pegawai}}$$

$$Rasio D = \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Total belanja}}$$

3. Rasio untuk mengukur solvabilitas jangka panjang:

$$Rasio A = \frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas Investasi}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Ekuitas Investasi}}{\text{Total Investasi}}$$

4. Rasio untuk fleksibilitas keuangan:

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Pembayaran Pokok Utang} + \text{Beban Bunga}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Kewajiban}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK}}{\text{Total Kewajiban}}$$

5. Rasio untuk mengukur kemandirian finansial

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

6. Rasio untuk mengukur solvabilitas layanan:

$$\text{Rasio A} = \text{Total Ekuitas} : \text{Jumlah Penduduk}$$

$$\text{Rasio B} = \text{Total Aset} : \text{Jumlah Penduduk}$$

$$\text{Rasio C} = \text{Total Belanja} : \text{Jumlah Penduduk}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Solvabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2023, rasio A sebesar 12,19 menunjukkan kas dan setara kas sangat mampu menutup kewajiban lancar, namun pada 2024 turun drastis menjadi 1,30 sehingga likuiditas kas melemah. Rasio B juga menurun dari 4,06 menjadi 0,84, artinya piutang usaha yang sebelumnya cukup besar untuk menutup kewajiban kini tidak lagi

memadai. Rasio C turun dari 20,6 menjadi 3,21 menandakan aset lancar masih lebih besar daripada kewajiban lancar, tetapi penurunan tajam ini mengindikasikan pelemahan likuiditas secara keseluruhan. Secara umum, kondisi keuangan jangka pendek pemerintah daerah pada 2024 jauh lebih lemah dibandingkan dengan 2023, sehingga perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan kas dan piutang.

Tabel 1. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek

Tahun	Rasio A	Rasio B	Rasio C
2023	12,19	4,06	20,6
2024	1,30	0,84	3,21

Solvabilitas Anggaran

Hasil perhitungan rasio solvabilitas anggaran menunjukkan bahwa Rasio A turun dari 4,82 pada 2023 menjadi hanya 0,95 pada 2024, menunjukkan bahwa pendapatan bersih terhadap belanja non-modal melemah drastis. Rasio B juga menurun dari 4,83 menjadi 1,20, meskipun masih di atas 100%, yang berarti pendapatan bersih masih cukup untuk menutup belanja operasional. Rasio C turun dari 49,10% menjadi 31,10%, menandakan kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap belanja pegawai semakin berkurang. Rasio D yang semula 120,00% turun menjadi 98,00%, artinya pada 2024 total belanja lebih besar daripada total pendapatan. Secara keseluruhan, solvabilitas anggaran menunjukkan tren penurunan yang signifikan, sehingga pemerintah daerah perlu mengendalikan belanja agar tidak melebihi pendapatan.

Tabel 2. Rasio Solvabilitas Anggaran

Tahun	Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D
2023	4,82	4,83	0,49	1,20
2024	0,95	1,20	0,31	0,98

Solvabilitas Jangka Panjang

Rasio A dan B tidak terdefinisi karena kewajiban jangka panjang nihil pada kedua tahun, sehingga tidak ada beban utang jangka panjang yang harus ditanggung. Rasio C menunjukkan ekuitas investasi terhadap total investasi yang sangat tinggi, yakni 226,43 pada 2023 dan 198,65 pada 2024. Walaupun terjadi penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa ekuitas investasi jauh melampaui total investasi, sehingga struktur permodalan daerah tetap sangat kuat. Dengan tidak adanya kewajiban jangka panjang, pemerintah daerah memiliki posisi keuangan yang aman dalam jangka panjang.

Tabel 3. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang

Tahun	Rasio A	Rasio B	Rasio C
2023	Ø	Ø	226,43
2024	Ø	Ø	198,65

Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan Kabupaten Bojonegara menunjukkan kondisi yang sangat berbeda antara tahun 2023 dan 2024. Pada Rasio A dan C, hasil tidak terdefinisi karena pembagi berupa pokok utang, beban bunga, maupun kewajiban jangka panjang bernilai nol, sehingga tidak dapat digunakan untuk menilai fleksibilitas. Rasio B pada 2023 mencapai 109,55 kali atau 10.955%, menandakan kemampuan

menutup kewajiban dengan pendapatan bersih yang sangat tinggi. Namun, pada 2024 turun drastis menjadi 19,58 kali atau 1.958%, yang menunjukkan penurunan kemampuan fiskal akibat meningkatnya kewajiban. Rasio D juga mengalami penurunan signifikan, dari 191,46 kali atau 19.146% pada 2023 menjadi 35,72 kali atau 3.572% pada 2024, meskipun masih menunjukkan bahwa pendapatan bersih jauh lebih besar daripada kewajiban. Secara keseluruhan, fleksibilitas keuangan daerah melemah pada 2024 dibandingkan 2023, sehingga ruang fiskal untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak atau ekspansi belanja menjadi lebih terbatas.

Tabel 4. Rasio Fleksibilitas Keuangan

Tahun	Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D
2023	Ø	109,55	Ø	191,46
2024	Ø	19,58	Ø	35,72

Kemandirian Finansial

Tabel 5 menunjukkan Rasio A turun dari 3,88% pada 2023 menjadi 3,65% pada 2024, sedangkan rasio B turun dari 4,66% menjadi 3,58%. Kedua rasio ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan maupun belanja masih sangat rendah, yaitu di bawah 5%. Hal ini menandakan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah masih lemah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset agar tidak terlalu bergantung pada alokasi dana dari pusat.

Tabel 5. Rasio Kemandirian Finansial

Tahun	Rasio A	Rasio B
2023	0,038	0,466
2024	0,036	0,358

Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan penurunan ekuitas dan aset per jiwa, dari Rp 15,62 juta dan Rp 15,65 juta pada 2023 menjadi Rp 13,61 juta dan Rp 13,77 juta pada 2024. Sebaliknya, belanja per jiwa meningkat dari Rp 5,94 juta menjadi Rp 7,32 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ekuitas dan aset per penduduk menurun, pemerintah daerah meningkatkan belanja per jiwa, yang bisa berarti adanya peningkatan layanan publik, tetapi juga menambah beban fiskal yang harus ditanggung.

Tabel 6. Rasio Solvabilitas Layanan

Tahun	Rasio A	Rasio B	Rasio C
2023	15.622.775/jiwa	15.654.498/jiwa	5.942.257/jiwa
2024	13.606.000/jiwa	13.770.000/jiwa	7.322.000/jiwa

Pembahasan

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi pemerintahan. Pembentukan kabupaten ini bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih merata. Secara administratif, Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara memiliki pusat pemerintahan di Boroko dan terdiri atas beberapa kecamatan yang sebagian besar bercirikan wilayah perdesaan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan perkembangan yang cenderung stabil, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum mengalami perbaikan secara bertahap, namun persoalan kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kondisi sosial ekonomi tersebut memengaruhi arah kebijakan fiskal pemerintah daerah, terutama dalam menentukan prioritas belanja yang bersifat wajib dan strategis.

Perekonomian daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan jasa, sementara kontribusi sektor industri pengolahan masih relatif terbatas. Struktur ekonomi semacam ini berdampak pada kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketergantungan fiskal ini tidak serta-merta mencerminkan lemahnya kinerja pemerintah daerah, melainkan menunjukkan keterbatasan struktural yang umum dihadapi oleh daerah dengan basis ekonomi primer.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Penyusunan laporan keuangan tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sehingga informasi keuangan yang disajikan tidak hanya mencerminkan realisasi anggaran, tetapi juga menggambarkan posisi keuangan dan kinerja operasional pemerintah daerah secara lebih menyeluruh.

Karakteristik umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut mencerminkan kondisi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang masih berkembang, ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pendapatan transfer, serta peran APBD yang signifikan dalam menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Kondisi ini relevan dengan konsep kondisi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dikemukakan oleh Ritonga, yang menekankan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan dan menjaga keberlanjutan layanan publik sangat dipengaruhi oleh struktur pendapatan, struktur belanja, serta fleksibilitas fiskal yang dimiliki.

SIMPULAN

Secara umum, kondisi keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya penurunan likuiditas dan fleksibilitas fiskal dari 2023 ke 2024. Rasio solvabilitas jangka pendek yang pada 2023 sangat tinggi, turun drastis pada 2024, menandakan kas, piutang, dan aset lancar tidak lagi mampu menutup kewajiban lancar secara memadai. Solvabilitas anggaran juga melemah, terlihat dari rasio pendapatan terhadap belanja yang turun di bawah 100% pada 2024, sehingga belanja lebih besar daripada pendapatan.

Dari sisi solvabilitas jangka panjang, posisi keuangan relatif aman karena tidak ada kewajiban jangka panjang, meskipun ekuitas investasi terhadap total investasi sedikit menurun. Fleksibilitas keuangan yang sebelumnya sangat tinggi pada 2023, turun tajam pada 2024 akibat meningkatnya kewajiban, sehingga ruang fiskal daerah semakin terbatas. Kemandirian finansial tetap rendah, dengan PAD hanya menyumbang kurang dari 5% terhadap total pendapatan maupun belanja, menunjukkan ketergantungan

besar pada dana transfer pusat. Sementara itu, solvabilitas layanan memperlihatkan penurunan ekuitas dan aset per jiwa, tetapi belanja per jiwa meningkat, yang bisa berarti adanya peningkatan layanan publik namun juga menambah beban fiskal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu memperkuat likuiditas dengan mengoptimalkan pengelolaan kas dan piutang, serta menekan pertumbuhan kewajiban agar rasio solvabilitas jangka pendek kembali sehat; melakukan efisiensi belanja operasional dan belanja pegawai untuk menjaga keseimbangan anggaran; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah sehingga kemandirian fiskal tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat; serta memastikan belanja per jiwa yang meningkat benar-benar diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari pengeluaran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aithan, I., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Berdasarkan APBD Tahun 2024. *Jurnal Ekonomi Dan Administrasi Modern*, 9(2). <https://journal.fexaria.com/j/index.php/>
- Darmi, T. (2018). Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 22(1), 1–13. <https://journal.ugm.ac.id/jkap>
- Disastra, Y. I., Hamim, U., & Rachman, E. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(4), 993–1000. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i4.2860>
- Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan? *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12). <https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1519>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, & Eka Putri, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Professional*, 11(2), 585–592. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7224>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Mulia, S., & Widiatmoko, J. (2025). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Periode 2019-2023). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 9(1).
- Nadofah, N., Jaenudin, M., & Utami, A. F. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia: Evaluasi 38 Provinsi dalam Era Desentralisasi. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 34–46. <https://doi.org/10.33005/jdg.v15i1.5081>

- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure of Local Governments Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164.
- Santoso, R. T., Syukri, M., Ermawati, D. A. P., & Hasanah, N. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.32477/jrabi.vxix.xxx>
- Sinaga, L., Ginting, G. A. S., Sembiring, F., Saragih, P. L., Lubis, P. K. D., & Matondang, K. A. (2026). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD dan LKPP) Perspektif Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5996>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Wang, X., Dennis, L., & Tu, Y. Sen. (2007). Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States. *Public Budgeting & Finance*, 27(2), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x>